PERATURAN DESA TIRTOMULYO

Nomor : 04 Tahun 2017

Tanggal : 09 Agustus 2017

Tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM DESA)

TAHUN 2016 - 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KRETEK
DESA TIRTOMULYO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah atas Rahmat dan Hidayat dari Allah SWT, akhirnya dokumen **" RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TIRTOMULYO TAHUN 2016 – 2022"** dapat terselesaikan dengan baik sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatit, demokratis dan pemberdayaan mejadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen RPJMDes yang telah disusun ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode tahun 2016 – 2022 dan ini merupakan pengejahwantahan dari Visi dan Misi Lurah Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJM Desa diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun Pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

RPJM Desa Tahun 2016 – 2022 Desa Tirtomulyo secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2016 – 2022 Desa Tirtomulyo ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembagunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

Tirtomulyo, 01 Agustus 2017

Tim Penyusun RPJM Desa

Mukhlison Afandi, S.Pd.I

SISTEMATIKA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA

Tirtomulyo tahun 2016 – 2022

Kata Pengantar i

SISTEMATIKA RPJMDes iii

BAB I . PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 2

C. Pengertian 3

D. Maksud dan Tujuan 7

BAB II PROFIL DESA 9

A. Kondisi Umum Desa 9

1. Sejarah Desa 9

2. Demografi 10

3. Keadaan Sosial 13

4. Keadaan Ekonomi 14

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian wilayah Desa 16

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 17

3. Organisasi Lembaga kemasyarakatan Desa 20

C. Potensi dan Masalah 27

1. Potensi 27

2. Masalah 31

3. Isu dan Masalah Utama 35

BAB III VISI dan MISI..... 36

A. Visi dan Misi 36

1. Visi 36

2. Misi 37

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA 40

1. Strategi Internal 40

2. Strategi Eksternal 41

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 43

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 43

2. Arah Kebijakan Keuangan Desa 45

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 47

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 47

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 47

3. Bidang Pembinaan Masyarakat 48

4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat 48

BAB VII PENUTUP 49

LAMPIRAN

Matriks RPJMDes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika patisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan " ikut merasa memiliki " terhadap pembangunan didesanya. Selanjutnya masyarakat akan " ikut bertanggung jawab " terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenanganannya.

Di dalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantipasi, diantaranya keterbatasan sumberdaya manusia yang baik dan professional, keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal), belum tersusun lembaga sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangun sistem dan regulasi yang

jelas dan tegas, dan masih kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM Desa sangat penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 6 tahun ke depan. RPJM Desa memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJM Desa Kabupaten Bantul. Proses penyusunan RPJM Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM Desa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Sehingga diharapkan RPJM Desa ini telah mencerminkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Mentri Desa Nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2015 Tentang pedoman Peraturan Di Desa

C. Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana

prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

RPJM Desa, Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul 2016 – 2022 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Desa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa Tirtomulyo. Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan dapat terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (s*takeholders*) antar pelaku, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

- **Tujuan**

Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah :

1. Menyediakan dokumen strategis Desa mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Masyarakat luas maupun berbagai pelaku pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Tirtomulyo dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa.
3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
4. Meyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pelaku pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Desa.

BAB II

PROFIL DESA

A. Kondisi Umum Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat .

Desa Tirtomulyo salah satu dari 5 desa yang ada di Kecamatan Kretek yang terletak kurang lebih 3 km ke arah Barat dari Kecamatan Kretek, Desa Tirtomulyo mempunyai wilayah seluas : 418.730 ha dengan jumlah penduduk : 7752 dengan jumlah Kepala Keluarga : 2780 dengan Batas – batas wilayah sbb :

Sebelah Utara	Desa Sidomulyo
Sebelah Timur	Desa Donotirto
Sebelah Selatan	Desa Tirtosari
Sebelah Barat	Desa Srigading, Desa Caturharjo, Desa Murtigading

Iklim Desa Tirtomulyo sebagaimana desa–desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Desa Tirtomulyo.

1. Sejarah Desa

Adapun nama desa Tirtomulyo diambil dari kata Tirto dan Mulyo. Tirto artinya Air dan Mulyo artinya melimpah. Pada jaman dahulu sebelum terbentuknya Desa Tirtomulyo masih termasuk Kelurahan. Sebelum terbentuk Kelurahan Tirtomulyo (Kalurahan gabungan), terdiri dari 4 (empat) Kalurahan

yaitu Kalurahan Karen, Kalurahan Bracan, Kalurahan Krajan dan Kalurahan Soropadan. Masing-masing Kalurahan mempunyai Lurah sendiri-sendiri. Lurah Karen yaitu Djodjo Pawiro, Lurah Bracan yaitu Lurah Pawiro Atmojo, Lurah Krajan yaitu Lurah Djiko/Darmo Sanyoto, dan Lurah Soropadan yaitu Lurah Jowisno/Joyo Wisno. Tanggal 12 November 1947 empat Kalurahan tersebut bergabung menjadi satu Kalurahan dengan diberi nama Kalurahan Tirtomulyo. Dari kesepakatan Lurah 4 Kalurahan tersebut Kalurahan Tirtomulyo mengangkat Lurah pertama yaitu Sastro Midarso. Dengan adanya perubahan SOTK kabupaten Bantul Kelurahan Tirtomulyo menjadi Desa Tirtomulyo. Adapun Desa Tirtomulyo dibagi menjadi 15 (lima belas) Pedukuhan, yaitu :

1. Pedukuhan Plesan
2. Pedukuhan Paliyan
3. Pedukuhan Karen
4. Pedukuhan Gondangan
5. Pedukuhan Kergan
6. Pedukuhan Bracan
7. Pedukuhan Tokolan
8. Pedukuhan Tluren
9. Pedukuhan Gaten
10. Pedukuhan Jebugan
11. Pedukuhan Karangweru
12. Pedukuhan Genting
13. Pedukuhan Soropadan
14. Pedukuhan Jetis
15. Pedukuhan Punduhan

Pejabat Lurah Desa Tirtomulyo semenjak berdirinya Desa Tirtomulyo adalah sebagai Berikut :

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Sastro Midarso	Periode tahun 1947 s/d 1960	Lurah Pertama
2	R. Sucipto	Periode tahun 1961 s/d 1995	Lurah Kedua

3	Sukaca. HS	Periode tahun 1996 s/d 2004	Lurah Ketiga
4	Drs. Sujadi	Periode tahun 2005 s/d 2015	Lurah Keempat
5	Drs Sujadi	Periode tahun 2016 sampai sekarang	Lurah keLima

2. Demografi

Desa Tirtomulyo terdiri dari 15 Pedukuhan dengan jumlah penduduk sebesar 7752 jiwa merupakan salah satu dari 5 Desa di Kecamatan Kretek. Batas Wilayah Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Desa Sidomulyo
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Donotirto
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tirtosari
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Srigading, Desa Caturharjo, Desa Murtigading

Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 30 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 13 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 3 Km

Jumlah penduduk Desa Tirtomulyo pada tahun 2016 mencapai 7752 jiwa terdiri dari Laki-Laki 3725 jiwa dan Perempuan 4027 jiwa dengan 2780 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Tirtomulyo dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

Golongan Umur	Jumlah	Keterangan
0 Bln – 15Thn	536	
16 Bln – 65 Thn	4627	
66 Tahun keatas	2589	
Jumlah	7752	

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2016

b. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Tirtomulyo mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 7.640 Orang
- Kristen : 35 Orang
- Katolik : 70 Orang
- Hindu : 7 Orang
- Budha : - Orang

c. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat

akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Taman Kanak-kanak	205	
2	SD	1113	
3	SLTP	1065	
4	SLTA / SMK	1739	
5	Akademi/D1 – D3	161	
6	Sarjana S1	234	
7	Pasca Sarjana S2-S3	20	
JUMLAH		**4537**	

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2016

d. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Tirtomulyo sebagian besar masih berada di sektor pertanian.Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	2518	
2	Buruh Tani	2230	
3	Pedagang/wiraswasta	370	
4	Pegawai Negeri	285	
5	TNI/POLRI	65	
6	Pensiunan	138	
7	Peternak	7	

8	Pengrajin	5	
9	Jasa	18	
10	Tukang	225	
11	Pekerja Seni	25	
12	Lain-lain	1378	
13	Tidak Bekerja/Penganggur	302	

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2016

3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Tirtomulyo bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Desa Tirtomulyo yang masih tinggi menjadikan Desa Tirtomulyo harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Tirtomulyo seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	180 KK
2.	Jumlah penduduk miskin	395 KK
3.	Jumlah penduduk sedang	675 KK
4.	Jumlah penduduk kaya	1.453 KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	3.879 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	2.140 orang

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Gedung TK	4	1.	Poskesdes	1
2.	Gedung SLB	1	2.	Posyandu/Polides	15
3.	Gedung SD	2			
4.	Gedung SLTP	-			
5.	Gedung SLTA	1			

4. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Tirtomulyo sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 05 Tahun 2015 bahwa Sumber Pendapatan Desa meliputi :

1. Sumber Pendapatan Desa
   a. Dana Desa
   b. Alokasi Dana Desa
   c. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
   d. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
   e. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
   f. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

   Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

a. Tanah kas desa

b. Bangunan desa yang dikelola desa

c. Lain-lain kekayaan milik desa

Sebagaian besar mata pencaharian penduduk desa Tirtomulyo adalah petani, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi yang hidup dimasyarakat.

5. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan :

- Posyandu : 15 unit
- Poskesdes : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 4 unit
- SLB : 1 unit
- SD / MI : 2 unit
- SLTP / MTs : - unit
- SLTA / MA : 1 unit
- TPA / TPQ : 2 unit

3. Prasarana Umum lainnya

- Tempat ibadah : 22 unit
- Lapangan Olahraga : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
c. Kompetensi pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Tirtomulyo dengan luas 418.730 ha. Desa Tirtomulyo terdiri dari 15 Pedukuhan, yaitu Pedukuhan Plesan, Pedukuhan Paliyan, Pedukuhan Karen, Pedukuhan Gondangan, Pedukuhan Kergan, Pedukuhan Bracan, Pedukuhan Tokolan, Pedukuhan Tluren, Pedukuhan Gaten, Pedukuhan Jebugan, Pedukuhan Karangweru, Pedukuhan Genting, Pedukuhan Soropadan, Pedukuhan Jetis, dan Pedukuhan Punduhan. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Tirtomulyo terdiri dari Lurah Desa, Sekretaris Desa (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemrintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan,dan 15 Dukuh. Desa Tirtomulyo terdiri dari 66 Rukun Tangga (RT).

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Lurah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu Lurah Desa dalam bidang administratif Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Carik Desa dan

terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 15 pedukuhan yang dipimpin oleh 15 Dukuh yaitu; Dukuh Plesan, Dukuh Paliyan, Dukuh Karen, Dukuh Gondangan, Dukuh Kergan, Dukuh Bracan, Dukuh Tokolan, Dukuh Tluren, Dukuh Gaten, Dukuh Jebugan, Dukuh karang Weru, Dukuh Genting, Dukuh Soropadan, Dukuh Jetis, Dukuh Punduhan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Tirtomulyo

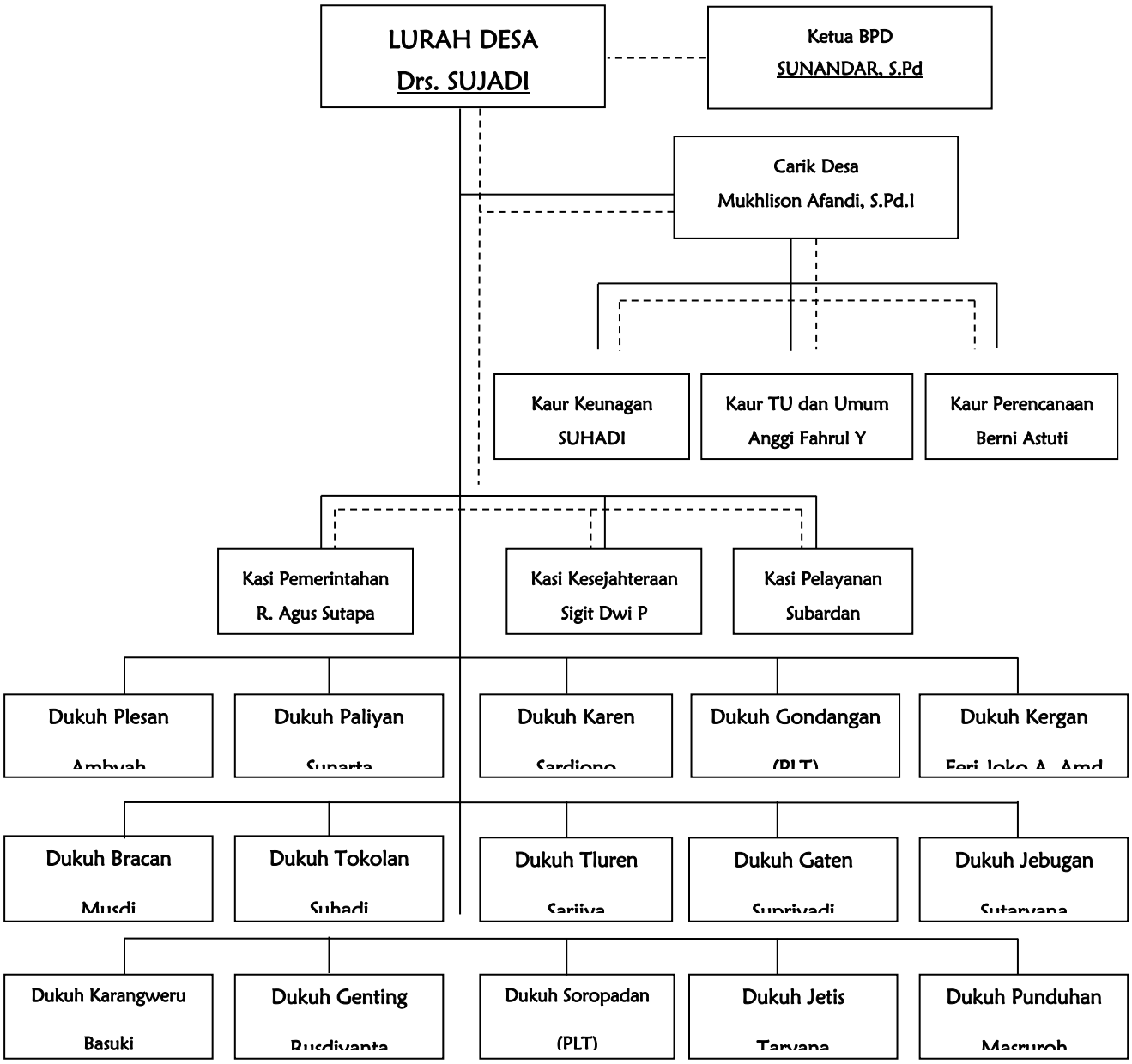

—— : Garis Komando

------ : Garis Koordinasi

Tabel : Nama Pejabat Pemerintah Desa Tirtomulyo

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Sujadi	Lurah Desa
2	Mukhlison Afandi, S.Pd.I	Carik Desa
3	R. Agus Sutapa, SE	Kasi Pemerintahan
4	Sigit Dwi Purwanto, ST	Kasi Kesejahteraan
5	Subardan	Kasi Pelayanan
6	Suhadi	Kaur Keuangan
7	Anggi Fahrul Yunarta, S.Pd	Kaur Tata Usaha dan Umum
8	Berni Astuti	Kaur Perencanaan
9	Ambyah	Dukuh Plesan
10	Sunarto	Dukuh Paliyan
11	Sardjono	Dukuh Karen
12	Sardjono	Plt. Dukuh Gondangan
13	Feri Joko Andriyanto, Amd. Kom	Dukuh Kergan
14	Musdi	Dukuh Bracan
15	Suhadi	Dukuh Tokolan
16	Sarjiya	Dukuh Tluren
17	Supriyadi	Dukuh Gaten
18	Sutaryana	Dukuh Jebugan
19	Basuki	Dukuh Karangweru
20	Rusdiyanto	Dukuh Genting
21	Taryana, S.Ag	Plt. Dukuh Soropadan
22	Taryana, S.Ag	Dukuh Jetis
23	Masruroh	Dukuh Punduhan

Tabel :Nama Badan Permusyawaratan Desa Tirtomulyo

No	Nama	Jabatan
1	Sunandar, S.Pd	Ketua

2	**Sugito**	**Wakil Ketua**
3	**Kasiyah**	**Sekretaris**
4	**Drs. Sugito**	**Anggota**
5	**Heri Susanto**	**Anggota**
6	**Kupon**	**Anggota**
7	**Ridwan Anas**	**Anggota**
8	**Sumantri**	**Anggota**
9	**Harsono**	**Anggota**
10	**Winarno**	**Anggota**

3. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tabel : Nama-nama LPMD Desa Tirtomulyo

No	Nama	Jabatan
1	Ig. Suparjo, BA	Ketua
2	Jumakir	Ketua II
3	Wagiyanto, S.Pd	Sekretaris I
4	Drs Purwanto, S.Pd	Sekretaris II
5	Sudarman	Bendahara I
6	Supriyadi	Bendahara II
7	Sardi	Seksi Prasarana Fisik
8	Tujo	

10	Supardiyono	Seksi Ekonomi
11	Suyanto	
12	Drs. Danu Suprapto	Seksi Sosial Budaya
13	Mc. Suharno	
14	Sihono	
15	Mujiyono	Seksi Agama
16	Y. Sukamdi	
17	Sunandar	Seksi Kepemudaan
18	Sugeng Narima, S.Pd	
19	Sukirmanto	Seksi Pendidikan dan Perpustakaan
20	Sri Maryanto	
21	Dra. Mustakimah	Seksi Peranan Wanita dan Persamaan Gender
22	Yuli Purwaningsih	
23	Sumardiyem	
24	Sarjono	Seksi Humas
25	Sujadiyono	

b. PKK

Tabel : Tim Penggerak PKK Desa Tirtomulyo

No	Nama	Jabatan
1	Drs. SUJADI	Pembina
2	Dra. Mustakimah	Ketua
3	Sri Yuni Rahayu	Wakil Ketua I
4	Sri Wuryani	Wakil Ketua II
5	Sumardiyem	Sekretaris I
6	Rukinem	Sekretaris II
7	Sri Mularsih	Bendahara I
8	Rini Yuliyanti	Bendahara II
9	Sutegawarti, S.Pd	Ketua Pokja I

10	Ariyanti	Sekretaris
11	Amirul Solikhah	Anggota
12	Jumilah	
13	Martinem	
14	Tri Yani Hasanah, S.Pd	
15	Wartini	
16	Hj. Sumarti	
17	Sri Siamsih	Ketua Pokja II
18	Nuryanti	Sekretaris
19	Budianingsih	Anggota
20	Elise Kusmiyati	
21	Pardiyah	
22	Sumarsih	
23	Istiqomah	
24	Nuryati	
25	Jumariyah	Ketua Pokja III
26	Daliyah	Sekretaris
27	Suci Lestari	Anggota
28	Maryani	
29	Kasiyah	
30	Musriyati	
31	Samilah	
32	Tumiyem	
33	Kartinah	Ketua Pokja IV
34	Masruroh	Sekretaris
35	Endah Dwi Lestari, S.Si.Apt	Anggota
36	Sri Ambarwati	
37	Parjinah	
38	Tutik supriyati	
39	Rujiyem	
40	Sri sukarti	

41	Berni Astuti	

c. Karang Taruna Desa

Tabel : Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Sujadi	Pelindung
2	Subardan	Pembina
3	Listawan Yeni Ismarwanto, S.H.I	Ketua
4	Marwan	Wakil Ketua
5	Hendri	Sekretaris I
6	Karlina	Sekretaris II
7	Al Arifin	Bendahara I
8	Erika	Bendahara II
9	Purnomo	Seksi Pendidikan dan latihan
10	Yuli Sutanto	
12	Huda	
13	Andri	
14	Winarno	
15	Nova Yamtini	
16	Asep Zan Parwita	Seksi Agama
17	Tri Heri Makmuri	
18	Winarno	
19	Achmad	
20	Aris Wibowo	
21	Dewi Rachmawati	
22	R. Kurniantoro	Seksi Seni dan Budaya
23	Erick	
24	Cahyo	
25	Fajar	
26	Dasto	
27	Feri Asmika	Seksi Olahraga dan Kesehatan

28	Dwi Ari pamuji	
29	Miftahuddin	
30	Rinung Anton Sugito	
31	Angga	
32	Sukis	
33	Giyono	
34	Apriko Setiawan	Seksi Ekonomi Produktif
35	Adit	
36	Alfi Hermawan	
37	Rendra Widodo	
38	Widodo	
39	Kisdi Suwarta	
40	Nunung Hidayat	Seksi Humas
41	Yuliantoro	
42	Rivan	
43	Maryanto	
44	Danang	
45	Yunan Yunarko	

d. Rukun Tetangga (RT)

No	Pedukuhan	Nama	Jabatan
1	Plesan	SUMADI	Ketua RT 01
2		SUPRIHATIN, SH	Ketua RT 02
3		MUJIYO	Ketua RT 03
4		ROHMADI	Ketua RT 04
5	Paliyan	KASIYO	Ketua RT 01
6		RIYANTO	Ketua RT 02
7		PRIYO SUTRISNO	Ketua RT 03
8		JONO LUKITO	Ketua RT 04
9	Karen	BASIRAN	Ketua RT 01
10		KISDIRAHARJO	Ketua RT 02

11		GUNAWAN	Ketua RT 03
12		SARJONO	Ketua RT 04
13		PITAYA	Ketua RT 05
14		UNTUNG WIDODO	Ketua RT 06
15	Gondangan	SUMARNO	Ketua RT 01
16		MARYONO	Ketua RT 02
17		SUDARMAN	Ketua RT 03
18		ACHMADI	Ketua RT 04
19	Kergan	DAMARDI	Ketua RT 01
20		MUJI KARYONO	Ketua RT 02
21		KISMODIHARJO	Ketua RT 03
22		TUWUH WIYONO	Ketua RT 04
23	Bracan	MARYOTO	Ketua RT 01
24		PURNAMA	Ketua RT 02
25		AHMAD JUWENI	Ketua RT 03
26		SRI MARWANTO, SPd.	Ketua RT 04
27	Tokolan	SUPARDIYONO	Ketua RT 01
28		SRI MARYANTO, SPd	Ketua RT 02
29		ISMUNARDI, SPd.	Ketua RT 03
30		KUSRIYADI	Ketua RT 04
31	Tluren	SUGITO	Ketua RT 01
32		SARJIYONO	Ketua RT 02
33		SUMARYANTO	Ketua RT 03
34		SIHONO	Ketua RT 04
35	Gaten	WAJIDI	Ketua RT 01
36		WAHYUDIYANTO	Ketua RT 02
37		TRI SUDARMADI	Ketua RT 03
38		MUHBIYANTO	Ketua RT 04
39	Jebugan	V. BUNTORO	Ketua RT 01
40		SUKIJO, SH	Ketua RT 02
41		TUMIJO	Ketua RT 03

42		ACHMAD DJUMALI	Ketua RT 04
43	Karang Weru	MARYONO	Ketua RT 01
44		SUKAMTO, Amd	Ketua RT 02
45		SARTONO	Ketua RT 03
46		PARJIMAN	Ketua RT 04
47		SUTIMAN	Ketua RT 05
48	Genting	Mc. Suharno	Ketua RT 01
49		Y. SUKAMDI	Ketua RT 02
50		MUJONO	Ketua RT 03
51		SADARI	Ketua RT 04
52		SUBAGYO	Ketua RT 05
53		MARTUJO	Ketua RT 06
54	Soropadan	SUPRIYONO	Ketua RT 01
55		SUKARJO	Ketua RT 02
56		TUGIMAN	Ketua RT 03
57		ARI PURWOKO	Ketua RT 04
58		JUMAKIR	Ketua RT 05
59	Jetis	NURYANTO	Ketua RT 01
60		SUKISNO	Ketua RT 02
61		NGADIYANTA	Ketua RT 03
62		KUPON	Ketua RT 04
63	Punduhan	TUMIJO	Ketua RT 01
64		SUKARTO	Ketua RT 02
65		KRISTADI	Ketua RT 03
66		MARYADI	Ketua RT 04

e. POKGIAT LPMD

No	Nama	Pokgiat Pedukuhan
1	Partono	Plesan
2	Sugeng Narimo	Paliyan

3	Suharjito	Karen
4	Heru Santosa	Gondangan
5	Kamidjo	Kergan
6	Sukaca. HS	Bracan
7	Suwono	Tokolan
8	Jumakir	Tluren
9	Sujiman	Gaten
10	Mujiyono	Jebugan
11	Sardi	Karangweru
12	Ridwan Anas	Genting
13	Sunandar, S.Pd	Soropadan
14	H. Temu Wiyadi, S.Pd	Jetis
15	M. Yudha Ari Wibowo	Punduhan

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap

jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka peran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi 'kosmetik' untuk sekedar memenuhi kuota adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.

C. Potensi dan Masalah

1. Potensi

Desa Tirtomulyo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum secara optimal dapat diberdayakan.

a. Sumber Daya Alam

Desa : Tirtomulyo
Kecamatan : Kretek
Kabupaten : Bantul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan persawahan	258.165	Ha
2	Sumber air	3	Sumber
3	Tanah Pekarangan/Pemukiman	151.130	Ha
4	Sungai	4980	M
5	Perkuburan	2,5	Ha

b. Sumber Daya Manusia

Desa : Tirtomulyo
Kecamatan : Kretek
Kabupaten : Bantul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Manusia (SDM)	Volume	Satuan
1.	**Penduduk dan keluarga**		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	3725	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	4027	Orang
	c. Jumlah keluarga	2780	KK
2	**Mata Pencaharian utama penduduk**		
	Petani	2518	Orang
	Buruh Tani	2230	Orang
	Pedagang/wiraswasta	370	Orang
	Pegawai Negeri	285	Orang
	TNI/POLRI	65	Orang
	Pensiunan	138	Orang
	Peternak	7	Orang
	Pengrajin	5	Orang
	Jasa	18	Orang
	Tukang	225	Orang
	Pekerja Seni	25	Orang
	Lain-lain	1378	Orang

	Tidak Bekerja/Penganggur	302	Orang
3	**Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan**		
	a. Lulusan S-1 keatas	254	Orang
	b. Lulusan D1,D2,D3	161	Orang
	c. Lulusan SLTA	1739	Orang
	d. Lulusan SMP	1065	Orang
	e. Lulusan SD	1113	Orang

Sebagian wilayah Desa Tirtomulyo mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam menjadi wilayah Desa wisata yaitu Kampung Gurami. Kampung Gurami merupakan aset Desa yang potensial dalam bidang pemberdayaan Masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Dusun Kergan. Selain Desa Wisata di Tirtomulyo juga berkembang usaha kecil mandiri. Diantaranya di Dusun Gondangan telah berdiri Pengolahan Air Kelapa menjadi Nata De Coco. Di Dusun Tluren pengolahan Nira Kelapa menjadi Gula Semut telah berkembang pesat. Dan masih banyak lagi usaha mikro kecil mandiri yang berpotensi untuk pengentasan kemiskinan warga masyarakat Desa Tirtomulyo. Semua Usaha masyarakat yang ada di wilayah desa Tirtomulyo menjadi aset Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Kelembagaan / Organisasi

Desa : Tirtomulyo
Kecamatan : Kretek
Kabupaten : Bantul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan	Keterangan
1.	BPD	1	Lembaga	
2.	LPMD	1	Lembaga	
3.	PKK	1	Lembaga	
4.	Karang Taruna	1	Lembaga	
5.	Rukun Tetangga (RT)	66		
6	POKGIAT LPMD	15		
7	Kelompok Tani	15	Kelompok	
8	Kelompok Ternak	15		
9	Kelompok Perikanan	15		
10	UMKM	186		
11	Lain-lain			

d. Potensi Prasarana dan Sarana

Desa : Tirtomuylo
Kecamatan : Kretek
Kabupaten : Bantul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	**Aset prasarana umum**		
	a. Jalan	10.800	M
	b. Jembatan	2	Unit

2	**Aset Prasarana pendidikan**		
	a. Gedung Paud	4	Unit
	b. Gedung TK	4	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	2	Unit
3	**Aset prasarana kesehatan**		
	a. Posyandu	15	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	--	Unit
	d. Sarana Air Bersih	--	-
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	-
	c. Kios Desa	-	Unit
5	**Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**		
	a. Jumlah kelompok usaha	23	Kel
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	15	Kel
	c. Usaha Kecil Mandiri	185	orang
6	**Aset berupa modal**		
	a. Total aset produktif	--	Ha
	b. Total pinjaman di masyarakat	--	/Tahun

e. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Desa : Tirtomulyo
Kecamatan : Kretek
Kabupaten : Bantul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	Gotong royong	425	Orang
2.	Adat istiadat	2	Orang
3.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	--	Orang
4.	Kesenian Jatilan/Reog	1	Kel
5.	Kelompok Jami'yah Desa	25	Kel
6.	Peringatan Hari Besar Nasional	3	Keg
7.	Peringatan hari Besar Agama	3	Keg
8.	Kelompok Tani Desa	15	Kel

2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini diperoleh dari hasil penggalian gagasan di tingkat Dusun dan musdes penyusunan RPJM Desa Tirtomulyo yang menghadirkan perwakilan dusun yang kompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan, sehingga kelelngkapan dan keakuratan data dapat dipertanggung jawabkan.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya permasalahan maka diupayakan reduksi data, sehingga permasalahan yang ada penting dan aktual.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel : Bidang dan Permasalahan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Kelengkapan peralatan dan administrasi Desa perlu adanya :Kelengkapan Peralatan Kantor/peralatan rumah tangga Desa, Kelengkapan Peralatan dan Operasional Administrasi Desa 2. Batas desa dan banyaknya Dusun di Desa Tirtomulyo perlu adanya penetapan dan penegasan batas Desa/Dusun; yaitu : gapuro batas desa/Dusun, 3. Perkembangan penduduk yang ada di Desa Tirtomulyo, status kepemilikan tanah yang belum tersurat perlu adanya Pendataan Desa: profil desa, Data penduduk, Monografi Desa, Fasilitasi Akte Kelahiran dan kematian, Pensertifikatan Tanah secara masal (prona) 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu : Musrenbangdes, Musdes, Musdus 5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : Pengelolaan SID, sketsa desa, peta desa, kalender Musim 6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : RPJMDes , RKPDes, APBDes 7. Penyelenggaraan dan evaluasi tingkat perkembangan pembangunan pemerintahan Desa; yaitu : LPPD, APBDes & LRA 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu : Sarpras DAN SPP PNPM-MPd 9. Profesionalitas kerja Pelayanan Masyarakat yang masih kurang efektif dan efisien perlu adanya Peningkatan Administrasi Desa : Kelengkapan Operasional Perkantoran, Peningkatan Pelayanan Masyarakat, SK lembaga Desa (LPMD, PKK,

		Pokgiat LPMD, RT, Karangtaruna), Kelengkapan Administrasi RT dan peralatan RT, pembuatan Program sistem Informasi Desa untuk pelayanan Masyarakat, pengadaan Mesin Asbsensi Vingger Print, 10. Peningkatan Keamanan : Poskamling, gardu Ronda, Alat Pemadam Kebakaran, Pembinaan LINMAS, Pemasangan Kamera CCTV di area Balai Desa 11. Peringatan hari Jadi Desa ; Penyelenggaraan Hari jadi Desa, Lomba RT, Lomba Dusun, Ekspo Desa, Gelar Budaya Desa 12. Peningkatan Wawasan Kebangsaan : penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela Negara
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1. Banyak lokasi yang sering banjir, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu : Pembuatan jembatan, pembangunan jalan (Cor Blok, Aspal), drainase, Saluran Irigasi , Pembangunan dan Perbaikan Pintu air, TPA (Sampah), Gorong-gorong, penerangan jalan, Rambu-rambu lalu Lintas, Meteran dan Instalasi Listrik bagi KK Miskin, Peninggian Bangket, Baliho Desa 2. Penataan Tata Ruang Desa dan Bangunan kantor Desa yang sudah lama perlu adanya Pembangunan dan rehab sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu : Rehap Kantor Desa dan bangunan Pendukung lainnya, pembangunan ruang hijau desa (Taman Desa), Pengadaan Genset, 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Polindes, Posyandu (Timbangan, Alat tensi), Alat Ukur (Diabetes, Kolesterol, Asam Urat), Jambanisasi, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Lantenisasi, MCK Komunal 4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang Pengembangan Ekonomi Produktif : Pembangunan gedung BUMDes, Pembangunan Kios Desa, Pembangunan WILKEL, 5. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, PAUD, TPQ, 6. Pembangunan Tata Lingkungan peningkatan Kebersihan dan kesehatan masyarakat :

		pembangunan Kandang kelompok, Sanitasi, IPAL komunal, MCK Komunal, Peresapan Air Hujan, Pembangunan PAMSIMAS 7. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : penghijauan, pemanfaatan Lahan Pekarangan 8. Pengembangan Infrastruktur Pedukuhan : Pembangunan Balai Dusun, pembangunan Pagar Makam, Pengadaan Peralatan Perawatan Jenazah, Papan Nama (Dukuh RT), papan Pengumuman, Papan Koran, Pembangunan Kamar Kereta Jenazah, Balai makam, Pembangunan Tiang Bendera dan Tugu Projo Taman Sari, Papan Nama Jalan/Gang, Sumur Makam, Pembangunan Menara Masjid, Pengadaan Sound System Pedukuhan, Pengadaan Genset, Pengadaan Tratak, Taman Dusun 9. Peningkatan Peribadahan Masyarakat : rehap Masjid, pembangunan Bangunan Pendukung Masjid 10. Penggantian Lahan/Sawah kas yang digunakan untuk fasilitas pendidikan/umum
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan Kesehatan Masyarakat : Pembinaan POSYANDU BALITA dan LANSIA, PHBS, PSN, Senam Lansia, Senam Kesehatan Jasmani, Gebyar Senam Sehat, Hatinya PKK, Penyuluhan Bahaya NAPSA, Deklarasi Stop BABS, Pengadaan Ambulan Desa, STBM 2. Pembinaan Pendidikan ; pembinaan Guru PAUD, Pembinaan Guru TK, Honor Guru Paud dan TK 3. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : RT, BPD, LPMD, PKK, Pokgiat LPMD, karang taruna 4. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan Kesejahteraan masyarakat; yaitu : siskamling, pembinaan keluarga Sejahtera, 5. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : PHBA, Pembinaan kaum Rois dan Pengadaan Alat Pengurusan jenazah (Kereta Jenazah), penyuluhan Masuknya Aliran sesat 6. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu : lapangan olahraga dan bangunan pendukung lapangan desa 7. Pembinaan lembaga adat; yaitu : bersih desa merti Dusun 8. Pembinaan kesenian dan sosial budaya

		masyarakat; yaitu : Pengadaan gamelan kelompok Karawitan, sragam kesenian (kelompok Ketoprak, Kelompok Karawitan, Kelompok Reog, Kelompok Gejok Lesung, Kelompok Moco Pat) 9. Peningkatan Kapasitas SDM : Out Bond, Kunjungan Karang taruna, Pembinaan kerja ke Luar Negeri,
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat, Yaitu : 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, UMKM, Pelatihan Kerajinan barang bekas, Kopwan dan Puap, Pelatiahan memasak KWT/PKK, Pelatihan BUMDes, Pelatihan Pembuatan Tempe/Emping Melinjo, Pelatihan pembuatan telur Asin, pelatihan pembuatan Tahu/Tempe, 2. Peningkatan kapasitas/Ketrampilan masyarakat; yaitu : Pelatihan Montir, Pelatihan Bengkel (Las, AC, Dll), Pelatihan menjahit, pelatihan Tukang, pelatihan Batik, Pelatihan Memasak 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana,: - Ekonomi Produktif : Modal BUMDes, Bantuan Modal UMKM, KUBE, - Pertanian : Sumur Bor Lahan Pertanian, Pengadaan Sarana Pertanian(Mesin tanam Padi, Mesin Tanam jagung, Mesin panen Padi, Mesin, Tleser, Alat Semprot, Disel Air, dll) pelatihan pembuatan pupuk Organik - Peternakan ; Pembangunan Kandang Kelompok, pelatihan pembuatan Pakan Ternak - Perikanan : pembangunan dan Rehap Kolam Kelompok, Pelatihan Pembuatan pakan 4. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : Bang Sampah, Pemanfaatan Lahan Pekarangan, BIOGAS, 5. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan

		Pemusyawaratan Desa; yaitu : Bimtek Pamong Desa, Sosialisaisi peyelenggaraan Pemdesa, Kunjungan Kerja, Perpustakaan Desa, 6. Pelatihan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Pelatihan karawitan, pelatihan MC Bahasa Jawa, pleatihan Sinoman, Pelatihan Mocopat 7. Peningkatan Gotong Royong Masyarakat ; Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong, 8. Banyaknya kelompok-kelompok yang belum berbadan hukum; Fasilitasi legalitas kelompok

3. Isu/ masalah Utama

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dideskripsikan permasalahan berikut prioritas penanggulangan masalah serta potensi unggulan beserta rencana pengembangannya. Untuk mengetahui secara detail mengenai potensi dan masalah yang ada di Lingkungan Desa dapat ***dilihat dalam lampiran.***

Demikian potensi dan masalah yang berhasil dihimpun dalam proses pengkajian keadaan desa. Selanjutnya potensi dan permasalahan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Desa Tirtomulyo selama 6 (enam) tahun kedepan.

BAB III

VISI Dan MISI

A. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Tirtomulyo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah Desa yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah Desa. Adapun Visi Lurah Desa Tirtomulyo adalah sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIRTOMULYO YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA "

1. SEHAT ; mengandung arti sehat jasmani dan Rohani. Masyarakat yang sehat jasmani dan Rohani merupakan modal utama untuk meraih tujuan hidup yaitu sejahtera lahir dan batin, bahagia dunia dan akhirat.
2. Cerdas ; merupakan modal utama untuk mencapai tujuan hidup, masyarakat yang cerdas akan mudah meraih cita-cita hidup dan tidak gampang terpengaruh hal-hal yang negatif dan melahirkan gagasan yang cemerlang untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya masyarakat yang tidak cerdas akan mudah diperalat dibohongi dan kemiskinan sehingga tujuan sejahtera akan sulit diraih.
3. Sejahtera; Artinya tercukupinya kebutuhan dasar hidup bagi masyarakat. Kebutuhan dasar hidup masyarakat adalah Wareg, Waras, Wasis.

a. Wareg artinya tercukupi kebutuhan dasar hidup masyarakat berupa pangan, sandang, papan. Ini merupakan modal dasar untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, maka perlu kiranya pemberdayaan masyarakat dibidang kebutuhan sandang, pangan, dan papan

b. Waras artinya tercukupi kebutuhan dasar hidup masyarakat berupa kesehatan. Masyarakat yang sehat baik jasmani maupun rohani merupakan modal dasar meraih tujuan hidup bahagia sejahtera lahir dan batin, bahagia dunia dan akhirat.

c. Wasis artinya masyarakat yang cerdas yang diberdayakan melalui pendidikan dan menjadi modal dasar hidup untuk menuju cita-cita masyarakat yang sejahtera yang disebut masyarakat madani.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakikat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan

di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Kepala Desa / Lurah desa Tirtomulyo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi desa Tirtomulyo sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Meningkatkan SDM aparatur Desa,
2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
3) Memberdayakan kelembagaan masyarakat,
4) Memberdayakan LINMAS Desa,
5) SertifikasiTanah dan,
6) Meningkatkan ketertiban, keamanan serta pengendalian dan pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

b. Bidang Pembangunan

1) Meningkatkan sarana dan prasarana umum
2) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
3) Meningkatkan sarana dan prasarana Transportasi
4) Memberdayakan dan meningkatkan swadaya masyarakat
5) Memanfaatkan sumberdaya alam dan pemanfaatannya
6) Memelihara sarana dan prasarana keamanan
7) Memelihara dan meningkatkan sarana peribadahan
8) Memelihara sarana dan prasarana pendidikan
9) Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan

c. **Bidang Kemasyarakatan**

1) Membina kerukunan umat beragama
2) Memelihara dan meningkatkan kemakmuran tempat ibadah
3) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaaan usaha kecil
4) Meningkatkan kecerdasan warga dan memberantas ketertinggalan
5) Memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong
6) Memberdayakan lembaga kemasyarakatan Desa
7) Memberdayakan dan pembinaan karang taruna
8) Pembinaan terhadap pendidikan anak dan remaja
9) Melestarikan budaya dan kesenian daerah
10) Mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan siap menghadapi dunia kerja
11) Membentuk dan mengembangkan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dapat dioptimalisasikan sektor pertanian baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
12) Mengoptimalkan sektor pertanian, baik pada tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasil

Dari bidang Pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan tersebut terangkum misi Desa Tirtomulyo, yaitu ;

a. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan terampil yang mampu melaksanakan pembangunan di Desa Tirtomulyo melalui pemberdayaan dan pelatihan – pelatihan.
b. Menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berkeadilan.

c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaaan usaha kecil dan penguatan bantuan modal.
d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
e. Mewujudkan kualitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertaqwa.
f. Meningkatkan pelayanan Administrasi, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan karang taruna.
g. Membentuk dan mengembangkan BUMDesa serta penguatan modal BUM Desa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada
h. mengoptimalakan sektor pertanian dan industri rumah tangga baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Startegi pembangunan desa merupakan upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa. Adapun strategi tersebut dalam pencapaian pembagunan desa adalah tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal, yakni :

A. Strategi internal

Strategi internal dalam pencapaian program pembangunan desa meliputi:

1) Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
2) Mendorong peningkatan keswadayaan dan pertisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.
3) Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supradesa dan infradesa. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapnya, maka leading sectornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan maka kepala desa menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaanya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapnya.
4) Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa semakin diperhitungkan di hadapan para stake holder.

B. Strategi eksternal

Strategi eksternal dalam pencapaian program pembangunan desa antara lain ;

1) Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
2) Membangun kerjasama di tingkat antardesa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reoroentasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3) Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa.
4) Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Desa melalui haering dan jaring aspirasi yang sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Apabila anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Desa, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5) Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator setiap kegiatan agar disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan

Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh Gapoktan dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh setiap lembaga berdasarkan program dan pelaksanaannya
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dalam setiap akhir tahun anggaran.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2016-2022, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa- kota. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ini secara detail mengenai startegi di masing-masing dusun / Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1) Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah desa dan kesejahteraan Pamong Desa.
2) Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.

3) Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
4) Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
5) Memfasilitasi kerjasama antar desa

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa:

1) Memenuhi kebutuhan dasar peningkatan pelayanan masyarakat dalam pembangunan dan rehab gedung fasilitas kantor Desa Tirtomulyo
2) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa (Jalan Desa, Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase, TPT)
3) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa kios Desa, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
5) Mengembangkan wajah desa Perkotaan dengan membangun infrastruktur taman desa dan lapangan olahraga
6) Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa

c. Pembinaan Kemasyarakatan:

1) Meningkatakan SDM masyarakat, pamong Desa, Lembaga Desa, TPK Desa, dan LINMAS Desa
2) Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
3) Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan masyarakat, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender(kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
2) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui STBM (Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat)
3) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan (dari sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan)
4) Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
5) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
6) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
7) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Secara lebih terinci program pembangunan desa dijabarkan dalam *lampiran* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

B. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Realisasi kegiatan pada setiap bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan harus terperinci meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, antara lain adalah :

a. Dana Desa (DD) dari APBN
b. APBD Provinsi, Dana Aspirasi
c. Program dari SKPD Kabupaten (APBD Kabupaten), Dana Aspirasi,
d. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten,
e. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
f. Pembagian Hasil Pajak dari kabupaten
g. Dana lain-lain yang syah

Sumber-sumber dana tersebut guna pelaksanaan Pembangunan di Desa Tirtomulyo selama 6 (enam) tahun kedepan.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Tirtomulyo dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2022, yaitu Mewujudkan masyarakat Desa Tirtomulyo Sehat, Cerdas, dan Sejahtera. Penjabaran dari visi dan Misi pemerintah Desa Tirtomulyo tersebut dituangkan dalam program pembangunan desa selama enam tahun kedepan dan terbagi menjadi 4 (empat) bidang yakni :

A. Bidang Pemerintahan

Progarm pembangunan bidang pemerintahan meliputi :

1. Kelengkapan Peralatan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Operasional Administrasi Desa
2. Kesejahteraan Lurah dan Pamong Desa
3. Kesejahteraan dan operasional BPD
4. Operasional Lembaga Masyarakat Desa
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Penertiban dan Akurasi data
7. Penyusunan Administrasi Desa
8. Penyelenggaraan Administrasi Desa
9. Pengelolaan Administrasi
10. Penetapan Batas Desa/Dusun

B. Bidang Pembangunan

Progarm pembangunan bidang Pembangunan meliputi :

1. Pembangunan dan rehap Gedung Kantor Desa
2. Pembangunan Lapangan Desa
3. Pembangunan jalan Desa
4. Pembangunan Infrastruktur Irigasi Desa
5. Pembangunan Jembatan
6. Pembangunan Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
7. Pembangunan Fasilitas Pendidikan
8. Pembangunan Kesehatan Masyarakat
9. Pembangunan Sarana Keamanan Masyarakat
10. Tata ruang Desa dan Pembangunan Infrastruktur Pedukuhan

C. Bidang Pembinaan Masyarakat

Progarm pembangunan bidang Pembangunan meliputi :

1. Pembinaan Lembaga Desa
2. Pembinaan Keagamaan
3. Peringatan Hari-hari Besar
4. Pendataan KK Miskin, Warga Putus Sekolah, dan Warga Buta Huruf
5. Peningkatan Keamanan dan wawasan kebangsaan Masyarakat
6. Kepedulian peningkatan kesehatan,
7. Pembinaan Kelompok Kesenian
8. Pembinaan Pendidikan
9. Pembinaan Kepemudaan dan olahraga

10. Pembinaan Keluarga sejahtera
11. Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

D. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Progarm pembangunan bidang Pembangunan meliputi :

1. Peningkatan Kapasitas pamong desa dan lembaga Desa
2. Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani, Ternak, dan Perikanan
3. Peningkatan Kesejahteraan Kepemudaan dan olahraga
4. Peningkatan Kegotong royongan Kemsyarakatan
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
6. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan
7. Peningkatan kelompok Kesenian
8. Peningkatan keamanan Masyarakat

Dari Program pembangunan diatas diharapkan selama enam tahun kedepan dapat terlaksana. Dan penjabaran program pembangunan tersebut dapat lihat dalam lampiran parameter kegiatan pembangunan *(terlampir)*.

BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipatif.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam tahap perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang mengetahui kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan umum desa dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJM Desa, Desa Tirtomulyo ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tahun 2016 -2022 yang selanjutnya pada setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP desa.

MATRIK DAFTAR KEGIATAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2016-2022
DESA TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan		Tahun						Sumber Dana I(APBDES), II(APBD Kab), III(APBD Prov), IV(Lain-lain)	Sasaran
					I	II	III	IV	V	VI		
1	**Bidang Pemerintahan**	Kelengkapan Peralatan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Operasional Administrasi Desa	1	Kegiatan Operasional Perkantoran	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			4	Penyediaan peralatan rumah tangga	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			5	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			7	Pengadaan peralatan kerja	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			8	Pengadaan mebelair	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			11	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			12	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			13	Pemeliharaan rutin/berkala balai desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		Kesejahteraan Lurah dan Pamong	1	Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Tunjangan Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa

		Desa	3	Tunjangan suami/istri Lurah Desa dan Pamong Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			4	Tunjangan Anak Lurah Desa dan Pamong Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			5	Tunjangan Kesehatan Lurah Desa dan Pamong Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			6	Tambahan Penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		Operasional Lembaga Masyarakat Desa	1	Operasional RT /RW	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			3	Operasional LINMAS Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			4	Pembinaan Lomba-lomba	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1	Operasional Piket Malam Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			3	Pengadaan seragam/pakaian dinas Lurah desa dan Pamong Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			4	Pengadaan mesin/kartu absensi		√	√				I	Desa
			5	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		√	√				I	Desa
			6	Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			7	Sosialisasi Produk Hukum Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			8	Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa	√	√					I	Desa
			9	Intensifikasi pemungutan PBB	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			10	Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa berbasis IT dan Media Informasi	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			11	Fasilitasi Operasional Pedukuhan	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		Kesejahteraan dan operasional BPD	1	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Operasional Badan Permusyawaratan Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			3	Pembentukan BPD	√			√				

		Penertiban dan Akurasi data	1	Penyusunan Monografi desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Penyusunan profil desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			3	Pendataan profil penduduk desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			4	Updating kependudukan tingkat RT	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			5	Updating kependudukan tingkat pedukuhan	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			6	Updating Mutasi Data Keluarga	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			7	Sertifikasi Tanah milik Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			8	Fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat secara massal	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			9	Fasilitasi Pembuatan Akte Kematian dan Akte Kelahiran	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		Penyusunan Administrasi Desa	1	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa	√						I	Desa
			2	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			3	Perubahan/Review RPJMdesa			√		√		I	Desa
			4	Penyusunan Tata Ruang Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			5	Penyusunan RAPERDES tentang APBDesa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			6	Penyusunan RAPERDES tentang Perubahan APBDesa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			7	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			8	Penyusunan RAPERDES tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			9	Penyusunan RAPERDES tentang Pemanfaatan Tanah Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			10	Penyusunan RAPERDES tentang Pengelolaan Kekayaan Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			11	Penyusunan RAPERDES tentang SOTK Pemerintah Desa		√	√	√	√		I	Desa
			12	Penyusunan RAPERDES tentang Kerjasama Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa

			13	Penyusunan RAPERDES tentang BUM Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			15	Penyusunan RAPERDES lainnya	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			16	Public Hearing Penyusunan RAPERDES	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			17	Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			18	Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan						√	I	Desa
			19	Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			20	Sosialisasi LPPD Akhir Tahun Anggaran	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			21	Sosialisasi LPPD Akhir Masa Jabatan						√	I	Desa
			22	Sosialisasi LKPJ Akhir Tahun Anggaran	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		Penyelenggaraan Administrasi Desa	1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			3	Penyelenggaraan Penggalian Gagasan/Musyawarah Dusun	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			4	Penyelenggaraan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			5	Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan Pembangunan Desa		√	√	√	√	√	I	Desa
			6	Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan		√	√	√	√	√	I	Desa
			7	Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		√	√	√	√	√	I	Desa
		Pengelolaan Administrasi	1	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Jaring Aspirasi BPD	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			3	Pengisian Pamong Desa	√		√	√	√	√	I	Desa
			4	Pengisian Staf Desa			√	√			I	Desa
			5	Pelantikan Pamong Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa

			6	Pengelolaan Tanah Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			7	Pengelolaan arsip Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			8	Peningkatan pelayanan satu pintu/terpadu	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			9	Pengadaan/penggantian tanah desa yang dilepaskan		√	√				**I**	Desa
			10	Pengelolaan Perpustakaan Desa		√	√	√	√	√	**I**	Desa
			11	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			12	Fasilitasi Penyediaan Lahan untuk pembangunan Fasilitas Pendidikan	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
		Penetapan Batas Desa/Dusun	1	Pembuatan Gapura Desa/Dusun/Patok Batas	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
2	**Bidang Pembangunan**	Pembangunan Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Kios Desa	√	√	√	√			**I**	Desa
			2	Pengembangan Desa Wisata		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			3	Rehabilitasi dan Penghijauan/Reboisasi Lahan Kritis, tidak produktif dan pemanfaatan pekarangan	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			4	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi tepat Guna	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			5	Pembangunan Gedung/kantor BUMDES		√	√				**I**	Desa, Pedukuhan
			6	Pembangunan Sumur di Lahan Pertanian		√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
		Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1	Pembangunan MCK Komunal	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			2	Pembangunan Jamban bagi Keluarga Miskin	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			3	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			4	Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan

			5	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air minum desa (PAMSIMAS)	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			6	Pengadaan Bak Sampah Rumah tangga dan Pembangunan Bak Sampah Sementara/Komunal	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			7	Fasilitasi Program Lantainisasi dan Listrik bagi Keluarga Miskin	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
		Pembangunan dan Rehab gedung Kantor Desa	2	Rehabilitasi Aula Balai Desa		√	√	√			**I**	Desa
			3	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendukung Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			4	Rehabilitasi Halaman Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			5	Pembangunan dan Rehab/Pemeliharaan Pagar Kompleks Balai Desa		√	√	√	√	√	**I**	Desa
		Pembangunan jalan Desa	1	Pembangunan Jalan Desa: Perubahan Status jalan, Aspal Jalan	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
			2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
			3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
		Pembangunan Infrastruktur Irigasi Desa	1	Pembangunan Talud/Bangket Afur/Bangket Saluran	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			2	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Desa	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			3	Pembangunan/ Rehabilitasi Peresapan Air Hujan	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			4	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			5	Angkat Walet	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			6	Pembangunan DAM/Pintu Air/Bendung	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan

		Pembangunan Lapangan Desa	1	Rehabilitasi Lapangan Desa		√	√	√	√	√	**I**	Desa
			2	Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Pendukung Lapangan Desa		√	√	√			**I**	Desa
		Pembangunan Jembatan	1	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan/Cor beton Desa		√	√	√			**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
		Pembangunan Fasilitas Pendidikan	1	Rehabilitasi Gedung PAUD dan TK Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			2	Rehabilitasi Bangunan Pendukung Gedung PAUD dan TK Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			3	Rehabilitasi/Pemeliharaan bangunan KBM Masyarakat		√	√			√	**I, II, III, IV**	Desa
			4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pelayanan Kesehatan tingkat Desa			√	√			**I, II, III, IV**	Desa
		Pembangunan Sarana Keamanan Masyarakat	1	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu/Pos Ronda		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			2	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan GAPURA Desa/Dusun		√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			3	Pengadaan sarana prasaranan Penerangan Jalan Desa/Dusun	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
		Tata ruang Desa dan Pembangunan Infrastruktur Pedukuhan	1	Pembangunan/Rehabilitasi Taman Desa/Ruang terbuka Hijau tk. Desa		√	√	√	√	√	**I**	Desa
			2	Pembangunan infrastruktur tingkat Pedukuhan		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan WIKEL		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan tempat ibadah	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			5	Pembanguna Gedung Serbaguna Pedukuhan		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
3	**Bidang**	Pembinaan Kepedulian	1	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan

	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	peningkatan kesehatan,	2	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Pedukuhan
			3	Penyuluhan bagi Ibu Hamil	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa
			4	Penyuluhan Hatinya PKK	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
			5	Penyuluhan Kesadaran Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			6	Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Pedukuhan
			7	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita		√	√	√	√	√	**I, II**	Pedukuhan
			8	Penyuluhan ASI Eklusif		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			9	Pembinaan, Penyuluhan dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Pedukuhan
			10	Pembinaan pengelolaan Tanaman Obat Keluarga		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			11	Pemberantasan Sarang Nyamuk	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			12	Pembinaan/Promosi Kesehatan, pola hidup bersih dan sehat	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			13	Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia	√	√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			14	Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama instansi terkait	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			15	Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
			16	Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Sub PPKBD	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
			17	Fasilitasi Kegiatan Kelompok pendamping Ibu	√	√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
		Pembinaan Pendidikan	1	Pengadaan sarana prasarana pendukung pendidikan	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			2	Pengelolaan dan Pembinaan taman bacaan masyarakat	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			3	Pengelolaan dan Pembinaan Kelompok Belajar Masyarakat	√	√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			4	Pengelolaan dan Pengembangan PAUD Desa/Dusun	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			5	Pengelolaan dan Pengembangan TK Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa

			6	Pengelolaan Tempat Pendidikan Al'quran		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			7	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita, anak PAUD dan TK	√	√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			8	Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak	√	√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			9	Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN	√	√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
		Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1	Analisis Kemiskinan Partisipatif		√	√	√	√	√	**I**	Desa
			2	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			4	Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			5	Fasilitasi Penyaluran RASKIN	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			6	Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			7	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Pemuda lainnya		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
		Pembinaan Lembaga Desa	1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			2	Pembinaan LINMAS Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			3	Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa Wisma	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			4	Pelaksanaan Hari Jadi Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			5	Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD dan Sub PPKBD	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa
		Pembinaan Keagamaan	1	Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			2	Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/guru TPA	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			3	Penyuluhan bahaya terorisme, aliran sesat dan organisasi terlarang		√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			4	Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan sosial Keagamaan	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan

			5	Pengembangan, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
		Peringatan Hari-hari Besar	1	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			2	Fasilitasi Kegiatan Peringatan hari besar Keagamaan	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
		Pendataan KK Miskin, Warga Putus Sekolah, dan Warga Buta Huruf	1	Pendataan dan Fasilitasi Keluarga Miskin dan Pengklasifikasian Kemiskinan	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			2	Pendataan dan Fasilitasi Kaum Difabel	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			3	Pendataan dan Fasilitasi warga putus sekolah dan buta huruf/aksara	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
		Peningkatan Keamanan dan wawasan kebangsaan Masyarakat	1	Pembinaan dan Pengadaan sarana prasarana pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			2	Pengembangan Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
			3	Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam berdemokrasi	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
			5	Pembinaan Politik Kader Bangsa	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
			6	Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
		Pembinaan Kelompok Kesenian	1	Pembinaan/Fasilitasi Organisasi Kesenian Desa	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			2	Pembinaan dan Pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			3	Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Merti Dusun	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan

			4	Pelaksanaan Gelar seni budaya daerah	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			5	Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
		Pembinaan Kepemudaan dan olahraga	1	Pembinaan dalam rangka pencegahan kenakalan remaja		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			2	Penyuluhan Penyalahgunaan dan bahaya Napza		√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			3	Pembinaan Kegiatan Olah Raga		√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			4	Pengadaan Sarana dan Prasaranan Olah Raga	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			5	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa
			6	Pelaksanaan Lomba Potensi Kepemudaan		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
		Pembinaan Keluarga sejahtera	1	Penyuluhan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk	√	√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			2	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			3	Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan anak terlantar	√	√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			4	Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			5	Penanggulangan orang yang mengalami Gangguan Jiwa		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			6	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			7	Sosialisasi kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan		√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			8	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			9	Pembinaan masyarakat yang akan kerja di Luar Negeri		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			10	Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan

4	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	Peningkatan Kapasitas pamong desa dan lembaga Desa	1	Peningkatan Kapasitas Pamong Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan TPK Desa	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa
			3	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa
			5	Pembinaan Informasi melalui Koran Masuk Dusun dan Internet Desa		√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			6	Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Desa		√	√	√	√	√	**I**	Desa
			7	Pelatihan Pemulasaran Jenazah/Pangrukti Loyo		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			8	Pelatihan Komputerisasi		√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			9	Sinkronisasi Program Kerja Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa		√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			10	Pelatihan Management dan penguatan modal BUMDES	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
		Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani, Ternak, dan Perikanan	1	Pelatihan dan Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Tani	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			2	Pengembangan dan Fasilitasi benih Lokal Pertanian, Peternakan dan Perikanan		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			3	Pelatihan dan Pengembangan dan Fasilitasi Pupuk Organik		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			4	Pelatihan dan Pemberdayaan dan Fasilitasi Kelompok Wanita Tani		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			5	Pemberdayaan, Pengembangan dan Fasilitasi Kelompok Perikanan dan Pertanian		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			6	Penetapan dan Pengembangan dan Fasilitasi Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			7	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Peternak		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			8	Pengembangan Teknologi Tepat Guna		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan

			9	Pengembangan Ternak secara Kolektif		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			10	Pengembangan Sentra Buah-Buahan/Kebun Buah		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			11	Pelatihan dan Fasilitasi Pembuatan Kandang ternak		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			12	Fasilitasi Kegiatan P3A dan GAPOKTAN		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			13	Fasilitasi Kegiatan Kelompok Wanita Tani		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
		Peningkatan Kepemudaan dan olahraga	1	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			2	Sosialisasi Informasi Pekerjaan		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			3	Pelatihan Penjualan Online		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			4	Pelatihan dan Fasilitasi Keterampilan Lainnya		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			5	Pelatihan dan Pemberdayaan bagi warga difabel/penyandang cacat		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
		Peningkatan kegotong royongan Kemsyarakatan	1	Pelaksanaan Bulan Bhakti gotong Royong dan Fasilitasi Gotong-Royong Masyarakat	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
			2	Fasilitasi Perlombaan/Gebyar Senam dalam rangka peringatan hari-hari khusus/besar	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			3	Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	**I, II**	Desa, Pedukuhan
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			2	Monitoring PMTAS		√	√	√	√	√	**I**	Desa
			3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			4	Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			5	Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan sampah		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			6	Penyelenggaraan Program DB4MK	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			7	Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi/Gizi Buruk		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan

		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan	1	Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Dusun	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			2	Pelatihan dan Fasilitasi dalam Bidang ekonomi Produktif	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			3	Seleksi Calon Direksi BUM-Desa		√	√	√	√	√	**I**	Desa
			4	Sosialisasi dan Pembinaan bagi Pedagang Pasar Desa dan Pengguna Kios Desa		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			5	Pelatihan dan Fasilitasi Kelompok usaha mikro dan kecil		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			6	Pelatihan dan Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Pengarajin		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			7	Pelatihan dan Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan desa wisata		√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Pedukuhan
			8	Pelatihan dan Fasilitasi Keterampilan dan Wirausaha bagi Keluarga Miskin		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			9	Pembinaan, Monitoring dan Fasilitasi Kelompok Program CDMK		√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			10	Fasilitasi Pelaksanaan CDMK		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
			11	Promosi/Festival/Pameran Produk-Produk Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa, Pedukuhan
			12	Fasilitasi Legalitas Kelompok		√	√	√	√	√	**I**	Pedukuhan
		Peningkatan kelompok Kesenian	1	Pelatihan dalam Bidang Kesenian	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
			2	Fasilitasi Kegiatan Kesenian	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
		Peningkatan keamanan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas LINMAS Desa	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa
			2	Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga	√	√	√	√	√	√	**I**	Desa

				Bidang Tidak Terduga								
				Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
				Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
				Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan
				Kegiatan Tak Terduga Lainnya	√	√	√	√	√	√	**I, II, III, IV**	Desa, Pedukuhan

Tirtomulyo, …….2017
Lurah Desa Tirtomulyo

Drs. Sujadi